

# **SKRIPSI**

## **DPRD DAN PARTAI POLITIK (STUDI PROFIL ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB PERIODE 2019-2024)**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Guna untuk memperoleh sarjana strata satu (SI)



**Disusun Oleh:**

**NOVERIKA HIKMATUL AINI**

**NIM. 218130094**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAM ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**DPRD DAN PARTAI POLITIK**  
**(STUDI PROFIL ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB**  
**PERIODE 2019-2024)**



Disusun dan diajukan oleh:

**NOVERIKA HIKMATUL AINI**  
**NIM. 218130094**

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

**Pembimbing 1**

**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN. 0008075914**

**Pembimbing 2**

**Hidayatullah, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0809038902**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi**  
**Ilmu Pemerintahan**

  
**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0816057902**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DPRD DAN PARTAI POLITIK**  
**(STUDI PROFIL ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB**  
**PERIODE 2019-2024)**



Disusun dan diajukan oleh:

**NOVERIKA HIKMATUL AINI**  
**NIM. 218130094**  
**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian Skripsi pada tanggal: 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Tim Penguji:**

1. Drs. H. Darmansyah, M.Si  
NIDN. 0008075914

(PU)

2. Hidayatullah, S.IP., M.IP  
NIDN. 0809038902

(PP)

3. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801

(PN)

Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Bekas,

  
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Noverika Hikmatul Aini

NIM : 218130094

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi, kecuali pendapat yang ditulis dengan jelas dengan dicantumkan sumber sebagai acuan dalam naskah skripsi dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Mataram, 14 Februari 2022



**NOVERIKA HIKMATUL AINI**  
**218130094**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVERIKA HIKMATUL AINI  
 NIM : 218130099  
 Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 16 NOVEMBER 2000  
 Program Studi : ILMU Pemerintahan  
 Fakultas : F.I.S.I.P  
 No. Hp : 087-865-993-207  
 Email : noverikah@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

DKPD dan Partai Politik (Studi Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.** *478*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 7 Februari ..... 2022

Penulis



Noverika Hikmatul Aini  
NIM.218130099

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noverika Hikmah Aini
NIM : 218130094
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 16 November 2000
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIP
No. Hp/Email : 087-865-993-207 / noverikal@gmail.com
Jenis Penelitian : [X]Skripsi [ ]KTI [ ]Tesis [ ] .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

DPKD dan Partai Politik (Studi Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07 Februari 2022
Penulis

Meterai Tempel
DC566AJX656251920
Noverika Hikmah Aini
NIM. 218130094

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

## MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,"

(QS Al-Baqarah: 216)

*"Let it flow, Allah knows best"*

*"Don't waste your time or time will waste you"*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Drs. H. Anwar, M.Pd (alm) dan Mama Hj. Ratminah, S.Pd yang telah mengajarkan bagaimana untuk menjadi perempuan yang kuat, sabar, dan pantang menyerah, dan selalu mendukung serta memberikan do'a disegala keputusan yang penulis ambil.
2. Ketiga kakakku, Yulia Zulhaida Gusneli, S.K.M., Roslia Ardiani Hijayati, S.AB., Roslia Arsiani Gusnita, S.Sos., ponakanku Kavian Anara Nugraha dan Alea Rossa Chalinda Rahmadi.
3. Seluruh keluarga besar AtSen.
4. Sahabat yang telah mendengar keluh kesah dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman kelas C Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018
6. Diri sendiri yang sudah mampu dan mau berjuang sampai sejauh ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “***DPRD DAN PARTAI POLITIK (Studi Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024)***” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir (skripsi) pada Universitas Muhammadiyah Mataram dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP, selaku Kaprodi Studi Pemerintahan beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan banyak masukan, waktu, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tuaku Drs. H Anwar, M.Pd (alm) dan Hj. Ratminah S.Pd yang sudah memberikan berbagai motivasi serta selalu mendo'akan dan mendukung dalam keadaan apapun demi lancarnya kuliah, proses pembelajaran, serta penyusunan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 02 Februari 2022

Penulis

## ABSTRAK

Profil anggota dewan yang tidak linier sebenarnya akan berpengaruh kepada efektifitas dan efisiensi kinerja anggota. Penelitian ini berfokus pada bagaimana profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan penelitian ini dilaksanakan selama satu (1) bulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dilapangan, jika dilihat dari aspek sumber daya manusia, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai karakteristik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat diantaranya karakteristik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan atribut asal partai, karakteristik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pendidikan, karakteristik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usia, karakteristik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan okupasi, karakteristik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan *gender*, dan karakteristik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asal daerah (kabupaten/kota). Dari enam indikator yang digunakan dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa problematika yang terjadi dilapangan, diantaranya yang berkaitan dengan partisipasi atau keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah muda yang dirasa masih sangat sedikit dikursi legislatif Nusa Tenggara Barat dan kurangnya partisipasi politisi perempuan dalam kursi legislatif Nusa Tenggara Barat.

**Kata Kunci** : Profil Anggota DPRD, DPRD NTB, Partai Politik

## ABSTRACT

The efficacy and efficiency of member performance will be influenced by the non-linear profile of board members. This research focuses on the members of the West Nusa Tenggara Regional People's Representative Council's profile. The purpose of this study is to establish the profile of members of the Provincial House of Representatives of West Nusa Tenggara for the years 2019-2024. The research approach used in this study is qualitative descriptive research. The research was conducted at the office of the Regional Representatives Council of West Nusa Tenggara Province, and it lasted one month. When viewed from the perspective of human resources, several indicators are used to assess the characteristics of the members of the West Nusa Tenggara Regional People's Representative Council, including the characteristics of the members of the Regional People's Representative Council based on the attributes of the origin party, the educational characteristics of members of the Regional People's Representative Council, the age characteristics of members of the Regional People's Representative Council, the occupational characteristics of members of the Regional People's Representative Council, the gender characteristics of members of the Regional People's Representative Council, and the regional characteristics of members of the Regional People's Representative Council. Several issues arise in the field, including those relating to the participation or presence of young members of the Regional People's Representative Council, who are perceived to be in short supply in the West Nusa Tenggara legislative seat, and the lack of participation of women politicians in the West Nusa Tenggara legislative seat.

**Keywords:** *Profile of DPRD Members, DPRD NTB, Political Parties*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Praktis .....	6
1.4.2 Manfaat Akademis .....	7
1.4.3 Manfaat Teoritis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>

2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Demokrasi .....	13
2.2.2 Pemilihan Umum .....	15
2.2.3 Partai Politik.....	17
2.2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	22
2.2.5 Pengambilan Keputusan.....	30
2.2.6 Kerangka Berpikir .....	35
2.2.7 Definisi Konseptual.....	37
2.2.8 Definisi Operasional.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Waktu Penelitian .....	40
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	41
3.5 Fokus Penelitian .....	42
3.6 Sumber Data.....	42
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.8 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
4.1.1 Profil Instansi .....	48

4.1.2 Struktur DPRD Provinsi NTB.....	51
4.2 DPRD Dan Partai Politik (Studi Latar Belakang Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024 .....	52
4.2.1 Karakteristik Anggota DPRD Berdasarkan Asal Partai .....	52
4.2.2 Karakteristik Anggota DPRD Berdasarkan Pendidikan.....	54
4.2.3 Karakteristik Anggota DPRD Berdasarkan Usia .....	57
4.2.4 Karakteristik Anggota DPRD Berdasarkan Okupasi .....	59
4.2.5 Karakteristik Anggota DPRD Berdasarkan Gender.....	61
4.2.6 Karakteristik Anggota DPRD Berdasarkan Asal Daerah (Dapil) .....	64
4.3 Dampak Profil Anggota DPRD NTB Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kedewanan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....36



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1 Penentuan Informan .....	41
Tabel 4.1 Daftar Nama Partai dan Jumlah Kursi .....	51
Tabel 4.2 Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Berdasarkan Atribut Partai .....	53
Tabel 4.3 Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Berdasarkan Atribut Pendidikan .....	56
Tabel 4.4 Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Berdasarkan Atribut Usia .....	58
Tabel 4.5 Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Berdasarkan Atribut Okupasi .....	60
Tabel 4.6 Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Berdasarkan Atribut Gender .....	62
Tabel 4.7 Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Berdasarkan Atribut Asal Daerah (Dapil).....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia kekuasaan orde baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, ditandai dengan adanya sentralisasi dan personalisasi kekuasaan. Pada bulan Mei tahun 1998 era orde baru berakhir seiring dengan tumbanganya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Berakhirnya era orde baru ini digantikan dengan era pasca-Soeharto atau yang lebih dikenal dengan era reformasi, yang sekaligus menjadi pertanda berakhirnya sentralisasi dan personalisasi kekuasaan pada era orde baru tersebut, dan memungkinkan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi sosial dan ekonomi sesuai dengan proporsinya.

Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Terjadinya perubahan dari era orde baru menjadi era reformasi tentunya melahirkan banyak perubahan disegala aspek di Indonesia khususnya politik. Pada era reformasi inilah pelaksanaan demokrasi dapat diwujudkan dengan memberdayakan fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara yang ada di tingkat pusat dan daerah. Namun hal ini tidak dapat terjadi begitu saja, perlu dilakukan redistribusi peran dan fungsi masing-masing lembaga secara adil dan proporsional.

Hak-hak warga negara yang sebelumnya sulit untuk diwujudkan perlahan mulai menemui titik terang. Salah satu contohnya yaitu hak warga

negara untuk berserikat dan berkumpul untuk mendirikan partai politik sebagai sarana dan wahana untuk artikulasi dan agregasi kepentingan serta pendidikan politik. Hak warga negeri ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Partai politik menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemunculan partai-partai politik baru di Indonesia pada saat ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia sudah mengimplementasikan hak individu yang dimilikinya untuk berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat demi mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara. Eksistensi partai politik pada saat ini tidak hanya dilapisan masyarakat tertentu saja. Khususnya di Indonesia, partai politik sudah mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan partai politik selalu menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik untuk diperbincangkan.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 2 Tahun 2011).

Kemunculan partai politik baru di Indonesia tentunya tidak hanya melahirkan warna baru didalam dunia perpolitikan. Tidak dapat dipungkiri munculnya partai politik tentu saja memiliki tujuan tertentu. Partai politik seharusnya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan kenyataanya yang terjadi, beberapa partai politik justru hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya saja. Khususnya para anggota partai politik yang memiliki ambisi untuk mengisi posisi strategis yang ada pada lembaga penyelenggara negara yaitu DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kedudukan DPRD di daerah ialah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, di NTB untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif, dilakukan mekanisme pemilu sebagai ajang kontestasi politik. Seperti yang kita ketahui, setiap individu diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dengan profil apapun selama mampu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan adanya kebebasan dan sama ratanya hak individu untuk menjadi wakil rakyat, banyak orang dengan profil pendidikan dan

pekerjaan yang berbeda-beda mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tanpa mengetahui secara jelas tugas, fungsi, dan peran yang sesungguhnya dari DPRD.

Profil anggota dewan yang tidak linier sebenarnya akan berpengaruh kepada efektifitas dan efisiensi kinerja anggota, contohnya dalam mengambil suatu keputusan maupun kebijakan, setidaknya orang yang memiliki latar pendidikan yang tinggi mampu dengan jernih untuk memberikan pemahaman, solusi dan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil berupa kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan permasalahan yang ada. Diharapkan nantinya produk-produk yang dikeluarkan DPRD berupa kebijakan-kebijakan yang disetujui berpihak kepada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Seperti halnya dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB tahun anggaran 2020 yang mendapat penolakan dari massa. Aksi unjuk rasa pun terjadi bahkan massa sampai melakukan pelemparan buah tomat di Kantor DPRD NTB. Koordinator Lapangan (Korlap) Andi Yamsha mengatakan "Kami menyimpulkan proses pembahasan RAPBD cacat prosedur. Karena tidak memenuhi prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana perundang-perundangan yang berlaku, akibatnya muncul kebijakan anggaran yang tidak tepat dan tidak bermanfaat untuk masyarakat", ia juga menuntut agar DPRD NTB menghentikan sidang penetapan APBD NTB 2020. Pasalnya, mereka menilai APBD NTB 2020 tidak mengedepankan

asas kepatutan dan kepentingan masyarakat. ([nasional.republika.co.id](http://nasional.republika.co.id) diakses pada 30 November 2021 pukul 13.30 WITA).

Selanjutnya, aksi demo tolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terjadi di Mataram tepatnya di kantor DPRD NTB pada 28 Juli 2021. Aksi mahasiswa yang menolak PPKM tersebut diwarnai perusakan pintu gerbang kantor DPRD NTB dikarenakan mahasiswa emosi tak satupun anggota DPRD NTB yang datang menemui mereka. Kemarahan massa pun tak terbendung hingga mulai memanjat masuk ke halaman kantor DPRD NTB, hingga massa merobohkan pintu gerbang setinggi dua meter namun aparat kepolisian berusaha menghalangi serta mencegah massa tak memasuki kantor DPRD NTB. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi melalui sejumlah spanduk berisi tuntutan dan kecaman akan buruknya penanganan Covid-19, serta menilai bahwa PPKM hanya akan menyengsarakan rakyat. ([wartalombok.pikiran-rakyat.com](http://wartalombok.pikiran-rakyat.com) diakses pada 30 November 2021 pukul 13.45 WITA).

Terjadinya aksi demonstrasi menjadi bukti nyata bahwa masyarakat NTB masih kurang puas dengan kinerja para anggota DPRD dalam membuat suatu kebijakan serta bagaimana anggota dewan dalam menangani dan menyelesaikan suatu permasalahan dianggap masih belum maksimal. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini terfokus kepada bagaimana gambaran profil dari masing-masing anggota dewan yang menjadi wakil rakyat yang tergabung dalam DPRD di daerah NTB terkait dengan sejauh mana profil dari

pada anggota dewan ini berpengaruh dalam kinerjanya sebagai wakil rakyat yang seharusnya mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di DPRD Provinsi NTB dengan judul penelitian “DPRD DAN PARTAI POLITIK (Studi Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan profil yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah profil anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari dilakukannya sebuah penelitian, maka diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

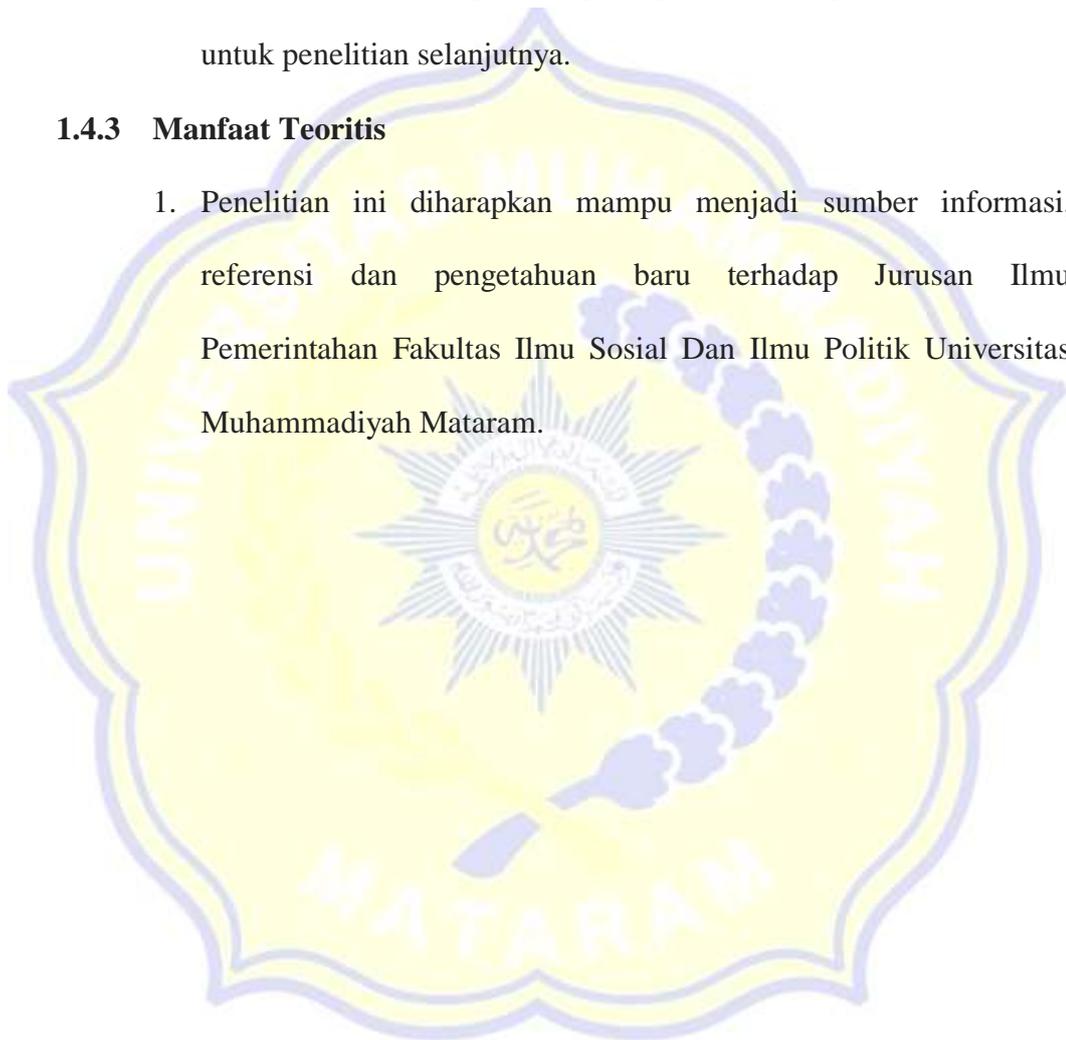
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi pandangan terhadap profil anggota DPRD Provinsi NTB.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

1. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4.3 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi, referensi dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggali informasi dan teori melalui penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan. Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan satupun judul dan lokasi penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut beberapa referensi penelitian yang penulis gunakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Drs. Darmansyah, M.Si yang di publikasikan dalam bentuk buku dengan judul DPRD dan Partai Politik (Studi Kasus: Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa profil atau latar belakang anggota dewan berdasarkan beberapa indikator sangat berkaitan dengan dinamika dan perubahan politik yang berlangsung di tingkat lokal khususnya mengenai gambaran dan situasi yang sesungguhnya dari DPRD Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, berdasarkan profil anggota dewan, dalam penelitian ini dijelaskan juga mengenai hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah yang memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi DPRD, proses dan hasil pemilihan Bupati dan potensi konflik DPRD dan Bupati (Pemerintah Daerah).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ana Rosita, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati dengan judul “Pengaruh Latar Belakang

Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan)”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa *political background* dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin seorang anggota DPRD memiliki *political background* dan pengetahuan yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik dan diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartikasari dengan judul “Pengaruh *Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan antara lain tingkat pendidikan dan relevansi bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Relevansi latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Dari penelitian ketiga tersebut, diketahui bahwa pengaruh tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan anggota DPRD tidak selamanya berpengaruh positif dan tidak pula selamanya berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi,

asalkomisi anggaran, dan pemahaman regulasilah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ferdinant Nuru dan Lidya Mawikere yang berjudul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD”. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD. Sedangkan pengalaman politik berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Dalam penelitian ini pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yakni pendidikan persekolahan berupa jenjang pendidikan yang telah baku mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Sedangkan pendidikan non formal yakni pendidikan yang diperoleh melalui pelatihan/seminar. Jika pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang tugasnya, maka pelatihan/seminar yang diikuti akan memberikan nilai tambah bagi anggota DPRD dalam memahami tugas dan fungsinya, dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Nuarta dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar)”. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang personal dan latar belakang politik tidak berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan dari DPRD. Sedangkan, budaya politik dan pengetahuan dewan yang justru berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi pengawasan DPRD.

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1)	Drs. Darmansyah, M.Si / 2002	DPRD dan Partai Politik (Studi Kasus: Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat)	Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa latar belakang atau profil anggota dewan sangat berkaitan dengan dinamika dan perubahan politik dan juga mengenai pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah yang memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi DPRD, proses dan hasil pemilihan Bupati dan potensi konflik DPRD dan Bupati (Pemerintah Daerah).
2)	Ni Made Ana Rosita, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati / 2014	Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan).	<i>Political Background</i> dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin seorang anggota DPRD memiliki <i>political background</i> dan pengetahuan yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik dan diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3)	Dewi Kartikasari / 2012	Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)	Pengaruh tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan anggota DPRD tidak selamanya berpengaruh positif dan tidak pula selamanya berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah.
4)	Ferdinant Nuru dan Lidya Mawikere / 2013	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD	Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD. Sedangkan pengalaman politik berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD.
5)	Mutia Nuarta / 2014	Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar)	Latar belakang personal dan latar belakang politik tidak berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan dari DPRD. Sedangkan, budaya politik dan pengetahuan dewan berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi pengawasan DPRD.

Secara umum permasalahan pada lima penelitian di atas sama dengan permasalahan pada penelitian yang penulis akan lakukan, perbedaannya hanya terletak dalam fokus penelitiannya saja. Dari lima penelitian di atas hanya satu penelitian yang memiliki fokus penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Empat penelitian lainnya berfokus pada keterkaitan latar belakang anggota dewan terhadap anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus untuk mencari tahu bagaimana profil anggota DPRD berdasarkan atribut asal partai, tingkat pendidikan, usia, okupasi, *gender* dan asal daerah (Kabupaten/Kota).

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Demokrasi**

#### **a) Definisi Demokrasi**

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi merupakan posisi vital yang kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara.

Dede Rosyada (2003:110) memaparkan pengertian demokrasi secara istilah menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

- 1) Joseph Schmitter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat
- 2) Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
- 3) Henry B Mayo, mengartikan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala atas asas kesamaan dan diselenggarakan dengan menjamin prinsip kebebasan politik
- 4) Affan Gaffar, memaknai demokrasi dalam dua bentuk pemaknaan secara normatif dan empirik, demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang terwujud dalam dunia politik praktis.

b) Prinsip Demokrasi

Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, rakyat dan para pelaksana kekuasaan harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-

prinsip demokrasi. Terdapat empat prinsip-prinsip demokrasi (Nadrilun, 2012:8-10):

- 1) Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya.
- 2) Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dengan status sebagai anggota suatu kekuasaan tertinggi yang disebut parlemen (lembaga legislatif), harus lazim dipilih melalui suatu pemilihan umum.
- 3) Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau pihak tertentu. Di antaranya tidak boleh ada pemilihan istimewa pada apapun karena adanya ketetapan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang walau dengan alasan apapun.
- 4) Harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan kerja.

### **2.2.2. Pemilihan Umum**

Reynolds (Yusnedi, 2019:2) Pemilihan Umum adalah metode di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk melaksanakan kontestasi politik untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar akan mewakili rakyat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan.

Setiap negara di dunia memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemilihan atas sebuah sistem pemilihan umum yang akan digunakan menjadi perdebatan sengit di kalangan partai politik. Namun, terlepas dari segala perdebatan yang terjadi, sistem pemilihan umum yang akan digunakan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini yang membimbing pemerintah dan partai politik guna menetapkan sistem pemilihan umum yang akan digunakan.

Pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat biasanya diikuti oleh anggota-anggota partai politik. Dengan adanya partai-partai politik ini, diharapkan mampu mewakili kepentingan spesifik warga negara. Kepentingan-kepentingan yang dimaksud antara lain nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan lain sebagainya yang seringkali dijanjikan partai politik ketika melakukan kampanye. Maka dari itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang dapat mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat, agar dapat terwakili dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan di parlemen.

Budiardjo (2008:461) mengemukakan bahwa ada banyak konsep yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam kajian ilmu politik telah dikenal berbagai macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, namun pada umumnya ada dua prinsip kokok, yaitu:

- a) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- b) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

### **2.2.3 Partai Politik**

- a) Definisi Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 2 Tahun 2011).

Partai politik merupakan bentuk perwujudan dari suatu negara demokrasi. Partai Politik menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Dimana, setiap individu berhak untuk menentukan partai mana yang akan dipilihnya dengan orientasi dan ideologi yang sesuai dengan kehendaknya agar tujuan dan cita-

citanya berpolitik dapat tercapai.

Partai politik memiliki peranan dan posisi yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Setiap partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai sarana perwujudan ekspresi ide-ide, pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.

Budiardjo mengemukakan Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo, 2008: 403).

Sedangkan, Carl J. Friedrich (Budiardjo, 2008: 404) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leader the control of a goverment, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*). (Budiardjo, 2008:404).”

Dari beberapa definisi partai politik di atas, penulis simpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama dan memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan dan kepentingan tertentu.

#### b) Fungsi-Fungsi Partai Politik

Fungsi utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan agar program-program dan tujuan yang telah disusun berdasarkan ideologi partai dapat terwujud. Satu-satunya cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah dengan ikut serta sebagai kontestan dan mampu memenangkan kontestasi politik tersebut.

Dalam buku Ramlan Surbakti (2010:149-154) dikemukakan fungsi dari partai politik, di antaranya:

##### 1) Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

##### 2) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan sistem politik pada umumnya dan pemeritahan pada khususnya,

##### 3) Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan,

#### 4) Pemandu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum untuk diperjuangkan.

#### 5) Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

#### 6) Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk menamatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

## 7) Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.

### c) Klasifikasi Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian sebagaimana dijelaskan oleh Budiarjo (2008:415) merupakan suatu konsep yang membahas tentang bagaimana partai-partai politik berinteraksi antara satu sama lain dalam sebuah sistem, dan bagaimana pula partai politik berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam sistem yang lebih luas yakni tatanan kehidupan sosial kebangsaan dan kenegaraan. Sistem kepartaian (*party system*) pertama kali dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* yang dalam pembahasannya membuat klasifikasi sistem kepartaian dalam tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi partai.

- 1) Sistem Partai Tunggal, merupakan praktek politik dalam suatu negara yang hanya membenarkan adanya satu partai saja yang resmi dalam negara, atau hanya satu partai yang mendominasi dari partai-partai lainnya dalam pengisian jabatan pemerintahan.
- 2) Sistem Dwi-Partai, adalah sistem politik kenegaraan yang hanya didominasi oleh dua partai besar saja yang silih berganti dalam mengendalikan pemerintahan tergantung hasil pilihan rakyat dalam

pemilihan umum.

- 3) Sistem Multi Partai, adalah sistem yang mengakomodir banyak partai akibat dari keanekaragaman budaya dan keyakinan masyarakat atau bangsa suatu negara, sehingga kepentingan kelompok etnis, agama, ras dan golongan berdasarkan visi dan misinya dapat diartikulasikan dalam partai politik untuk dikelola menjadi suatu aspirasi yang diperjuangkan dalam kebijakan negara dan pemerintahan.

#### **2.2.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

DPRD merupakan perwujudan dari berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada bergesernya kekuasaan politik dari lembaga eksekutif ke lembaga legislatif. Hal ini diperkuat dengan pemberian kewenangan yang luas kepada lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan daerah yang sekaligus terlibat dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan publik berupa Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan rakyat di daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

Sejak era reformasi sampai saat ini telah terjadi banyak perubahan peran dan fungsi lembaga pemerintahan pada sistem pemerintahan sekarang yang diharapkan sebagai upaya untuk mengurangi tumpang tindih peran dan fungsi antar lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antar keduanya untuk mendukung proses demokratisasi di daerah.

Bergulirnya arus reformasi sampai saat ini tentu saja menghasilkan perubahan politik yang terjadi. DPRD dan pemerintah diharapkan mampu bersungguh-sungguh bekerja sama dalam melakukan keberpihakan kepada masyarakat dengan menetapkan segala bentuk produk legilasinya yang belandaskan kebutuhan rakyat. Bahkan sinergitas antara DPRD dan pemerintah ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh pada persoalan-persoalan nyata masyarakat sampai pada level yang paling dasar, serta mampu menjadi institusi yang dengan tegas dan obyektif melakukan *check and balance* pada mekanisme kerja eksekutif.

Czudnowski (Putra, 2003) mengemukakan ada tujuh hal yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga DPRD, dan ini juga merupakan penentu dari penampilan (*performance*) seseorang elit politik. Secara singkat ketujuh hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Social Background*

Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang (calon) elit dibesarkan.

2. *Political Socialization*

Melalui sosialisasi politik, seseorang menjadi terbiasa (*familiar*) dengan tugas-tugas atau isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan demikian orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga dia dapat mempersiapkannya dengan baik.

### 3. *Initial Political Activity*

Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang (calon) elit selama ini. Dalam praktek politik, faktor ini menjadi semacam “belunggu” bagi elit sebab ia berhubungan dengan garis afiliasi kelompok yang diikutinya.

### 4. *Apprenticeship*

Faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang “diincar” oleh calon elit. Segi positif dari faktor ini adalah calon elit mengerti benar mekanisme kerja serta norma-norma yang berlaku dilingkungan kerjanya. Segi negatifnya adalah reputasi calon elit dapat “tenggelam” sebab kualitas elit yang digantikannya memiliki reputasi yang sangat tinggi, maka calon elit akan sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pendahulunya.

### 5. *Occupational Variables*

Hampir sama dengan faktor yang ketiga, bedanya disini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menarik, sebab elit politik sebenarnya

tidak sekedar dinilai dari popularitas saja (sesuai dengan ajaran demokrasi), namun dinilai pula faktor-faktor: kapasitas intelektual, rasa diri penting, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

#### 6. *Motivations*

Ini merupakan faktor yang paling penting. Asumsi dasar yang digunakan oleh pakar politik adalah orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena hal-hal sebagai berikut: a. Harapan (ekspektasi) atas *personal reward* (material, sosial, psikologi), b. Orientasi mereka terhadap isu-isu politik, seorang pemimpin atau oleh sebab yang lain, yang disebut *collective goals*.

#### 7. *Selection*

Faktor ini menunjuk kepada mekanisme rekrutmen politik yang berlaku. Selama ini dikenal ada dua jenis seleksi antara lain sebagai berikut:

a. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat serta prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Elit ini tidak harus datang dari kalangan partai sendiri. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- 1) Mekanismenya demokratis;
- 2) Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki;
- 3) Tingkat akuntabilitas pimpinan tinggi, dan
- 4) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai integritas pribadi yang tinggi (Wirosardjono, 1996).

b. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka.

Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Cara ini menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini dirasa kurang kompetitif.

Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD banyak mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan, kondisi dan peraturan yang sedang berlaku. Pasal 96 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa: “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”. Hal serupa mengenai fungsi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa; “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”. Selanjutnya dalam PP No. 12 Tahun 2018 ditegaskan bahwa fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RAPBD bersama kepala daerah,

fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Melalui fungsi legislasi, sebenarnya sudah memposisikan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD sebagai badan legislatif ikut serta sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Wasistiono, 2009).

Sobari (Arifuddin, 2020), memaparkan beberapa kinerja dari fungsi legislasi yang dapat dicermati dalam beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Pertama, mekanisme konvensional. Mekanisme ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan otonomi. DPRD hanya menerima usulan Rancangan Perda dari eksekutif, kemudian membahasnya hingga disetujui menjadi sebuah Perda baru. Situasi yang berbeda dari sebelumnya, DPRD sekarang dituntut agar tidak pasif menunggu usulan eksekutif saja, tetapi dapat mendesak eksekutif untuk mengajukan suatu Rancangan Perda, terutama yang menyangkut hal-hal krusial dan menjadi sumber masalah di suatu daerah.
- b. Kedua, mekanisme *review* (pengkajian). Pada saat ini DPRD sudah memiliki inisiatif untuk mau mengkaji ulang Perda lama yang sudah berjalan dan Perda baru yang dianggap mengalami resistensi dari masyarakat. Tujuannya yaitu selain melihat efektifitas berjalannya suatu Perda, juga untuk mencari tahu kemungkinan dilakukannya revisi terhadap

Perda tersebut.

- c. Ketiga, penggunaan hak inisiatif. DPRD dapat membentuk panitia-panitia kerja untuk melakukan kajian. Hasil kajian dari panitia kerja berupa draft Rancangan Perda dan dibahas secara internal di DPRD, yang kemudian diajukan dalam pembahasan bersama eksekutif, hingga disahkannya Perda tersebut.

Selanjutnya, DPRD untuk mencapai pengimplementasian yang maksimal mengenai pelaksanaan kinerja tidak terlepas dari peran aktor politik. Adapun pengaruh aktor politik di daerah begitu besar terhadap pelaksanaan ketiga fungsi di atas. Khususnya kualifikasi personal dari tiap aktor politik tersebut. Dalam kaitannya dengan anggota DPRD, kualifikasi personal dapat dilihat dari profil masing-masing anggota DPRD.

Darmansyah (2002:26) mengemukakan enam indikator yang digunakan untuk melihat profil anggota DPRD, diantaranya:

- 1) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut asal partai

Keberadaan profil anggota DPRD berdasarkan profil partainya dianggap cukup penting untuk menilai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dengan diberlakukannya sistem multi-partai, apakah partai politik baru mampu untuk merebut kursi legislatif atau justru partai politik lama lah yang masih menjadi pilihan utama masyarakat.

- 2) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan anggota partai dirasa cukup penting untuk

meningkatkan kualitas dan kompetensi wakil rakyat. Strata Pendidikan formal merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas anggota DPRD, walaupun Pendidikan formal sebenarnya bukanlah merupakan satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas dan Kompetensi anggota DPRD.

3) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut usia

Atribut usia ini mampu menggambarkan sudah sejauh mana terjadi transformasi di DPRD sejak era orde baru, reformasi sampai sekarang. Jika aktor politik lama (tua) lebih mendominasi suatu lembaga maka kendali politik akan terus sama dengan sebelumnya. Sehingga muncul tantangan dan hambatan dalam melakukan transformasi politik yang akan dilaksanakan oleh aktor politik baru (muda).

4) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut okupasi

Atribut okupasi anggota DPRD ini setidaknya mampu memberikan petunjuk profil aktor politik untuk memutuskan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkannya. Semakin banyak kategori okupasi para aktor politik menandakan bahwa akan semakin banyak pula situasi-situasi politik yang terjadi yang berkaitan dengan okupasi para anggota DPRD sebelumnya, yang menjadikan tidak tepatnya kebijakan yang dikeluarkan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

5) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut *gender*

Atribut *gender* masih menjadi persoalan khusus di ranah politik.

Keterwakilan perempuan dirasa masih sangat rendah dalam kursi legislatif, padahal jumlah perempuan jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Hal ini tentu saja mempengaruhi kebijakan yang diambil yang akan terus menerus berpihak kepada laki-laki karena kurangnya dominasi perempuan dalam anggota DPRD.

- 6) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut asal daerah (kabupaten/kota)  
Atribut asal daerah setidaknya mampu untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD. Misalnya terkait dengan fokus pembangunan yang akan dilakukan, apakah dengan mendominasinya asal daerah anggota DPRD tertentu mengakibatkan tidak meratanya pembangunan kepada daerah yang memiliki wakil legislatif lebih sedikit.

#### **2.2.5. Pengambilan Keputusan**

- a) Pengertian Pengambilan Keputusan

Syaekhu (2021) memaparkan, terdapat beberapa pengertian pengambilan keputusan dari beberapa ahli, diantaranya:

1. Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.
2. Menurut S. P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

3. Menurut James A.F. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Dari pengertian pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan untuk pemecahan dan penyelesaian masalah secara sistematis dalam suatu proses pengambilan keputusan.

#### b) Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan

Adapun fungsi dan tujuan dari dilakukannya pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Fungsi Pengambilan Keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi lain sebagai berikut:
  - a. Pangkal asal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun secara kelompok, dan secara institusional maupun organisasional.
  - b. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.
2. Tujuan Pengambilan Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya

menyangkut satu masalah, maka diputuskan bahwa tidak akan ada masalah dengan masalah lain.

- b. Tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih), yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif.

c) Unsur-Unsur Pengambilan Keputusan

Dalam memutuskan suatu keputusan, agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur dan komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut. Adapun unsur-unsur dan komponen-komponen dari pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari pengambilan keputusan.
2. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah
3. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya/di luar jangkauan manusia.
4. Sarana atau alat untuk menemukan atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.

d) Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambil keputusan bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. George R. Terry (Syaekhu, 2021),

mengatakan bahwa dasar-dasar dari dilakukannya pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Intuisi, pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan.
2. Pengalaman, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki pengalaman praktis pengetahuan. Karena pengalaman, seseorang dapat memperkirakan sesuatu yang dihasilkan, dapat memperhitungkan kerugiannya, baik buruknya keputusan yang akan diambil.
3. Fakta, pengambilan Keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada.
4. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan di bawahnya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan keiemahan.
5. Rasional, ada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala

tertentu, sehingga dapat mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

e) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Dalam melakukan pengambilan keputusan tidak begitu saja terjadi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Posisi atau kedudukan.

Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan seseorang dapat dilihat dalam hal berikut. Letak posisi; dalam hal ini apakah ia sebagai pembuat keputusan (*decision maker*), penentu keputusan (*decision taker*) ataukah staf (*staffer*). Tingkatan posisi; dalam hal ini apakah sebagai strategi, *policy*, peraturan organisasional, operasional, teknis.

2. Masalah.

Masalah atau *problem* adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki dan harus diselesaikan.

3. Situasi.

Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan, yang berkaitan dengan satu sama lain, dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita lakukan.

4. Kondisi.

Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya-sumber daya.

## 5. Tujuan.

Hasil akhir yang ingin dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah ditentukan/telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif.

### **2.2.6. Kerangka Berpikir**

Era reformasi di Indonesia dimulai ketika runtuhnya era orde baru pada tahun 1998 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Terjadi banyak perubahan dari era orde baru ke era reformasi disegala aspek di Indonesia. Hak-hak warga negara yang sebelumnya sulit untuk diwujudkan perlahan mulai menemui titik terang. Salah satu contohnya yaitu hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul untuk mendirikan partai politik sebagai sarana dan wahana untuk artikulasi dan agregasi kepentingan serta pendidikan politik.

Partai politik menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Tujuan utama dari suatu partai politik tentu saja untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui suatu pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan ajang kontestasi politik bagi para aktor politik untuk menjadi wakil rakyat (DPRD).

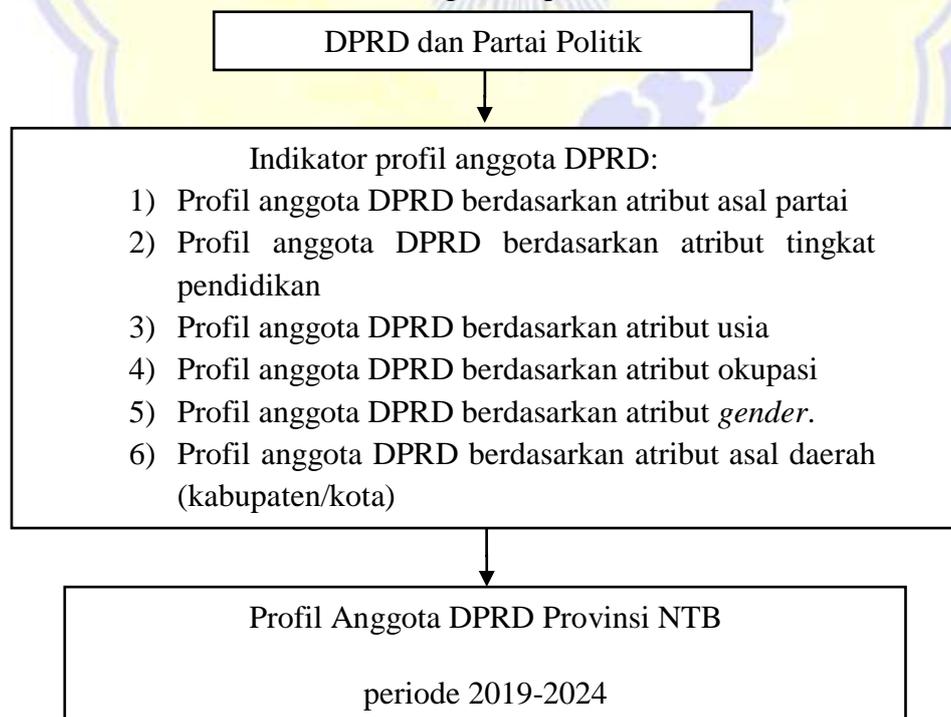
DPRD merupakan lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi atau surara rakyat. Untuk melaksanakan tugas secara maksimal diperlukan pengetahuan, wawasan serta keahlian yang relevan dengan tugas DPRD itu sendiri. Maka dari itu untuk mengetahui kualitas anggota DPRD NTB harus

diketahui secara lengkap profil dan profil dari masing-masing anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan enam indikator:

1. Profil anggota DPRD berdasarkan atribut asal partai,
2. Profil anggota DPRD berdasarkan atribut tingkat pendidikan,
3. Profil anggota DPRD berdasarkan atribut usia,
4. Profil anggota DPRD berdasarkan atribut okupasi,
5. Profil anggota DPRD berdasarkan atribut *gender*,
6. Profil anggota DPRD berdasarkan atribut asal daerah (kabupaten/kota).

Hasil akhir dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu untuk melihat profil dari masing-masing anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019-2024.

**Gambar 2.1**  
Kerangka Berpikir



### **2.2.7. Definisi Konseptual**

#### 1) Demokarasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertujuan agar kedaulatan rakyat dapat tercapai. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki banyak peran, rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan.

#### 2) Pemillihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum adalah mekanisme pemilihan yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan mewakili rakyat dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Di sisi lain, pemilihan umum juga dijadikan sebagai satu-satunya sarana untuk melaksanakan kontestasi politik antar partai politik maupun aktor politik untuk dapat terpilih menjadi wakil rakyat. Melalui proses inilah akan terlihat wakil rakyat yang benar-benar akan mewakili rakyat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan.

#### 3) Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki tujuan, kehendak dan cita-cita yang sama untuk diperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari partai politik ialah untuk mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan kedudukan politik di posisi-posisi strategis.

#### 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan lembaga legislatif mampu untuk memberikan pengawasan yang luas atas jalannya pemerintahan di daerah.

#### 5) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menentukan suatu tindakan menggunakan teori-teori dan teknik-teknik secara sistematis yang akan digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang ada agar keputusan yang diambil sesuai dengan permasalahan yang ada.

### **2.2.8. Definisi Operasional**

Indikator Profil Anggota DPRD:

#### 1) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut asal partai

Keberadaan profil anggota DPRD berdasarkan profil partainya dianggap cukup penting untuk menilai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya

#### 2) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan anggota partai dirasa cukup penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi wakil rakyat.

#### 3) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut usia

Atribut usia ini mampu menggambarkan sudah sejauh mana terjadi

transformasi politik di DPRD.

4) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut okupasi

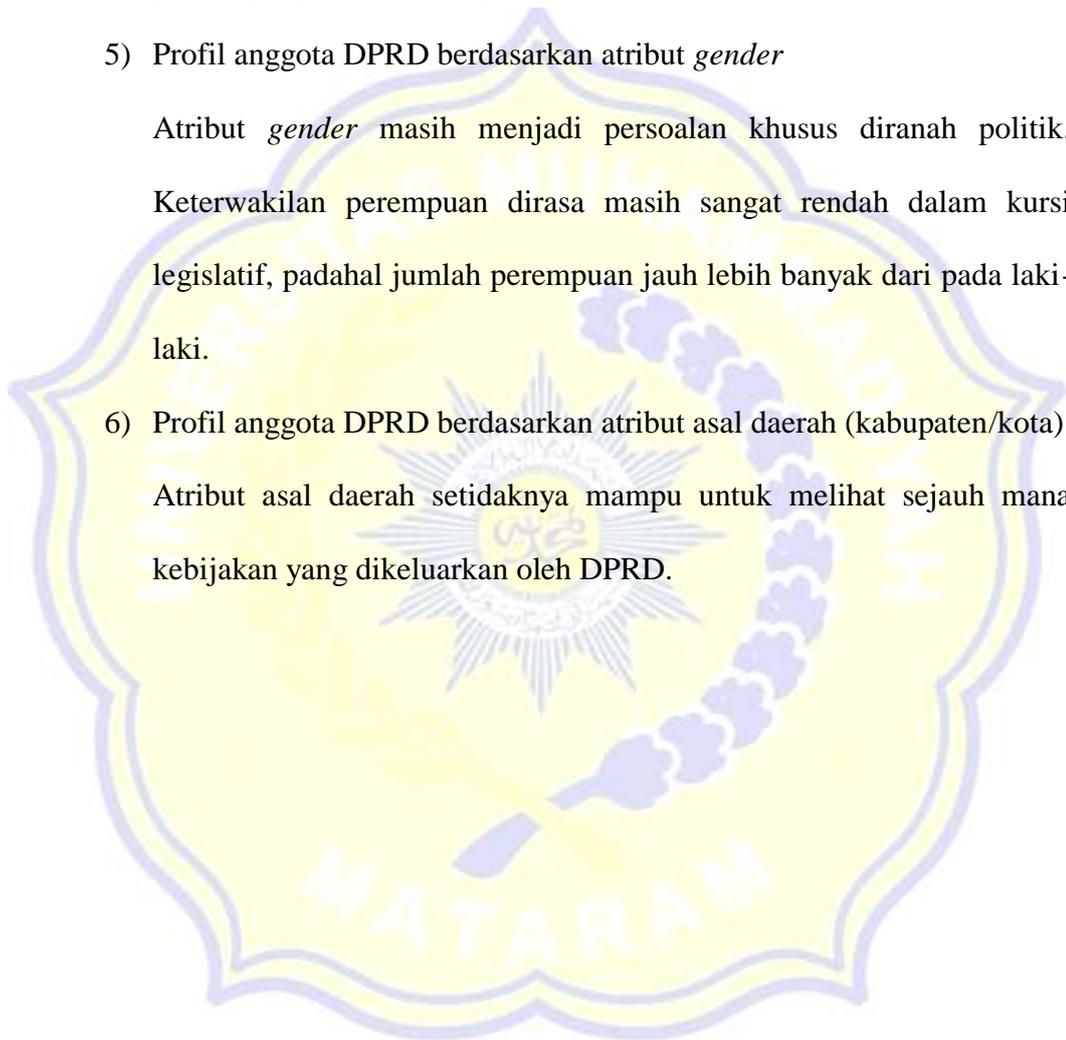
Atribut okupasi anggota DPRD ini setidaknya mampu memberikan petunjuk profil aktor politik untuk memutuskan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkannya.

5) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut *gender*

Atribut *gender* masih menjadi persoalan khusus diranah politik. Keterwakilan perempuan dirasa masih sangat rendah dalam kursi legislatif, padahal jumlah perempuan jauh lebih banyak dari pada laki-laki.

6) Profil anggota DPRD berdasarkan atribut asal daerah (kabupaten/kota)

Atribut asal daerah setidaknya mampu untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017:6).

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan penelitian yang akan dilakukan secara lebih rinci dan akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian utama dan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan. Udayana No. 11 Mataram, NTB, Indonesia-83122.

#### **3.3 Waktu Penelitian**

Penelitian tentang DPRD dan Partai Politik (Studi Profil Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024) dilaksanakan kurang lebih 1 bulan pada bulan Desember sampai Januari setelah dilaksanakannya seminar proposal.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan seorang informan atas pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Untuk menentukan informan pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Artinya, teknik pemilihan informan sudah sesuai dengan keinginan penulis karena penulis sudah mengetahui tentang letak tempat maupun lokasi yang akan menjadi objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2018:95-96) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, seseorang yang akan menjadi informan ialah seseorang yang dianggap paling tahu mengenai permasalahan yang kita teliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan memilih informan sebagai informan yang dapat memberikan gambaran dan informasi tentang bagaimana profil anggota DPRD Provinsi NTB.

Informan merupakan faktor penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan adanya informan, diharapkan mampu untuk memberikan informasi mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun daftar informan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.2**  
Penentuan Informan

No.	Informan	Jabatan
1.	H. Najamuddin Moestafa	Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB
2.	H. Achmad Puaddi, FT., SH	Ketua komisi IV DPRD NTB

No.	Informan	Jabatan
3.	Ir. Misbach Mulyadi	Anggota Komisi II DPRD NTB
4.	Umar Said, S.Ag	Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTB
5.	H. Umar Said, S.Ag.	Anggota Komisi III DPRD NTB
6.	Lalu Ahmad Ismail, S.H.	Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB
7.	Drs. H. A. Hafid	Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bapak
8.	Lalu Satriawandi, S.T.	Ketua Fraksi Partai Golkar

### 3.5 Fokus Penelitian

Pada saat melakukan suatu penelitian, fokus penelitian harus terarah. Ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian tidak terlalu melebar dari apa yang akan diteliti. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. (Moleong, 2017-94).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah DPRD dan Partai Politik (Studi Profil Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024).

### 3.6 Sumber Data

Kriteria data pada penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti merupakan data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang hanya terlihat, terucap, tetapi data yang berisi makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2018:10). Terdapat dua sumber data dalam penelitian kualitatif ini, diantaranya:

### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini didapatkan penulis melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Pengamatan tidak hanya dilakukan melalui pernyataan yang diberikan informan, melainkan perilaku dan gerak-gerik informan saat menjawab juga sangat penting untuk diikutsertakan sebagai bahan pengamatan saat penelitian, agar penulis dapat memastikan apakah pernyataan yang diucapkan oleh informan dapat dipercaya atau tidak.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang atau anggota DPRD yang memahami tentang profil anggota DPRD itu sendiri.

### 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dari penelitian ini didapatkan penulis melalui buku, undang-undang, penelitian terdahulu, artikel, arsip profil anggota DPRD dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan DPRD dan Partai Politik (Studi Profil Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024).

## **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018:224).

Dalam melakukan penelitian diperlukan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, hal ini bertujuan agar data yang diperoleh penulis tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara (Meleong, 2010:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama dari wawancara yaitu kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam melakukan wawancara agar pertanyaan yang diajukan oleh penulis tidak keluar dari topik penelitian maka sebelumnya harus disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian.

Terdapat dua bentuk metode wawancara, diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk memunculkan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Pertanyaan yang diajukan tidak perlu disusun terlebih dahulu, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan.

## 2. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2010:216) dokumentasi merupakan setiap pernyataan tertulis maupun tidak tertulis yang disusun oleh seseorang untuk keperluan suatu peristiwa. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya.

Penggunaan metode dokumentasi digunakan untuk mendukung data. Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian tersebut, maka data dan bahan yang digunakan adalah data yang diperoleh lapangan untuk kemudian didukung dengan data dan dokumen- dokumen lapangan untuk kemudian didukung dengan data dan dokumen– dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2017) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Herberman (Sugiyono, 2018:246-247) mengemukakan teknik analisis data melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan:

- a. Pengumpulan data (*data collection*), Pengumpulan data menjadi aktivitas pertama dan utama dalam menggali informasi, data dan hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dari informan secara langsung, baik dari dokumen atau arsip yang terkait
- b. Reduksi data (*data reduction*), Mereduksi data dapat berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap penulis akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.
- c. Penyajian Data (*data display*), Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- d. Penarikan kesimpulan (*conclusion*), Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, dan dokumentasi berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis, setelah data tersebut direduksi dan disajikan.

